

PERSPEKTIF DISINTEGRASI BAGI MAHASISWA PAPUA DI GORONTALO

Oleh :

Rusli Moko¹ (Ruslimoko97@gmail.com)
Mika Mokoginta² (mikamokoginta23@gmail.com)

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk melihat bagaimana perspektif mahasiswa Papua terhadap tuntutan referendum yang mengarah pada proses disintegrasi bangsa di Papua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa umumnya mahasiswa Papua di Gorontalo tidak sependapat dengan tuntutan tersebut. Hal ini dikarenakan tidak adanya diskriminasi yang mereka terima selama mereka di Gorontalo, disisi lain masyarakat Gorontalo sangat terbuka dan menerima keberadaan dengan penuh toleransi antara sesama. Adapun hal-hal yang menjadi pertimbangan mereka tidak setuju dengan tuntutan referendum adalah 1) pada aspek pendidikan, mereka telah diperlakukan khusus oleh negara melalui jalur masuk perguruan tinggi dan biaya pendidikan yang mereka terima, selain itu domisili juga menjadi pertimbangan dominan bagi mahasiswa Papua di Gorontalo dalam dunia pendidikan. 2) Pemerataan dan kekhususan kebijakan pembangunan di Papua membuat mahasiswa Papua di Gorontalo merasa kehadiran negara telah membawah efek perubahan bagi masyarakat Papua. 3) kecintaan dan rasa memiliki terhadap negara sebagai faktor penentu mahasiswa tidak menyepakati tuntutan referendum yang mengarah pada disintegrasi bangsa.

Kata Kunci : *Perspektif, Disintegrasi, Mahasiswa Papua, Gorontalo*

ABSTRACT

This paper aims to see how Papuan students' perspectives on the demand for a referendum lead to the process of disintegration of the nation in Papua. The results showed that generally Papuan students in Gorontalo disagreed with these demands. This is because there is no discrimination that they have received while they are in Gorontalo, on the other hand Gorontalo people are very open and accepting their existence with full tolerance among others. The things that are considered by them not agreeing with the referendum demands are 1) in the aspect of education, they have been specially treated by the state through the entrance to higher education and the cost of education they have received, besides that domicile is also a dominant consideration for Papuan students in Gorontalo in the world of education. 2) Equality and the specificity of development policies in Papua make Papuan students in Gorontalo feel that the presence of the state has led to the effects of change for the people of Papua. 3) love and ownership of the state as a determining factor for students not agreeing to the demand for a referendum that leads to the disintegration of the nation.

Keywords: *Perspective, Disintegration, Papuan Students, Gorontalo*

PENDAHULUAN

Negara adalah sekumpulan orang yang menempati wilayah tertentu dan diorganisir oleh pemerintah negara yang sah, yang umumnya memiliki kedaulatan. Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut, dan berdiri secara independent. Negara Indonesia merupakan negara multicultural yang terdiri dari suku, agama, ras dan bahasa. Keanekaragaman budaya merupakan kekayaan bagi bangsa Indonesia. Konsep keanekaragaman termaktub dalam filosofi hidup bangsa yakni Bhineka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Filosofi berbangsa tersebut menjadi nilai luhur bagi setiap bribadi-pribadi manusia Indonesia yang sudah terpatri dalam semangat berbangsa dan bernegara.

Hingga saat ini permasalahan bangsa dan negara ini belum usai, salah satu masalah yang selalui menggerogoti tatanan kenegaraan adalah desintegrasi bangsa. Sejak kemerdekaan, letupan-letupan

¹ Penulis merupakan mahasiswa Progm Studi PPKn Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo

² Penulis merupakan mahasiswa Progm Studi PPKn Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo

kepentingan daerah melalui pemberontakan terhadap pusat sangat kuat, hingga hari ini yang tersisa adalah Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Organisasi Papua Merdeka (OPM) sangat mengganggu eksistensi Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Permasalahan gerakan separatis di Aceh misalnya, telah menguras konsentrasi negara hingga terakhir negara harus mengakui keberadaan Aceh dengan memberikan hak keistimewaan dengan jalan pengakuan akan adanya partai lokal dan penegakan hukum Islam. Sebaliknya perlakuan negara terhadap masyarakat Papua, negara memberikan tupoksi khusus terhadap Papua melalui otonomi khusus, artinya dengan otonomi khusus untuk Papua akan memperpendek rentang kendali antara negara dengan Papua serta menciptakan keseimbangan pembangunan antara Papua dengan daerah lainnya.

Kehususan perlakuan negara tersebut sebagai wadah untuk menyelesaikan konflik kepentingan antara negara dengan masyarakat Papua. Namun demikian, hal tersebut belum di anggap cukup oleh masyarakat Papua. Gerakan separatis masih ada pada beberapa tahun ini hingga memakan korban jiwa baik bagi masyarakat maupun perangkat negara seperti TNI dan Polisi. Persoalan tersebut menguat hingga melibatkan massa yang begitu besar di seluruh penjuru Papua untuk menuntut referendum kepada Indonesia. Gerakan tersebut di picu oleh klaim rasisme yang dilontarkan kepada masyarakat Papua. Hingga saat ini, negara belum bisa mencari solusi untuk pemecahan masalah tersebut.

Agenda referendum tersebut akan mengarahkan masyarakat Papua untuk keluar dari negara kesatuan Republik Indonesia. Artinya ancaman disintegrasi bangsa bagi masyarakat Papua adalah hal yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Negara perlu mensejajarkan urusan Papua agar stabilitas politik dalam negeri bisa terjaga. Isu disintegrasi bangsa melalui persoalan rasisme terhadap masyarakat Papua juga sangat terasa di Gorontalo. Di lapangan mahasiswa asal Papua dan seluruh elemen masyarakat di Provinsi Gorontalo mengutuk keras atas tindakan rasisme bagi Papua. Disisi lain, mahasiswa Papua di Gorontalo tidak sependapat jika permasalahan rasisme tersebut akan mengantar negara bangsa ini kedalam proses disintegrasi bangsa. Mahasiswa Papua di Gorontalo merasa nyaman dan diterima secara baik oleh masyarakat Gorontalo. Disisi lain dengan kemudahan mereka terhadap akses pendidikan melalui beasiswa Adik dan beasiswa lainnya serta jalur khusus masuk perguruan tinggi diseluruh Indonesia tanpa tes membuat mereka merasakan bahwa nasib generasi muda Papua sekarang sangat diperhatikan oleh negara. Selain itu, akses pembangunan di Papua telah merata dan seimbang dengan daerah-daerah lain. Atas pertimbangan tersebut mahasiswa Papua di Gorontalo merasa bahwa mereka adalah bagian dari Indonesia dan Gorontalo, artinya nasionalisme mahasiswa Papua di Gorontalo masih tertanam secara baik.

TINJAUAN TEORI

Disintegrasi adalah keadaan tidak bersatu padu yang menghilangnya keutuhan, atau persatuan serta menyebabkan perpecahan. Disintegrasi dalam masyarakat Indonesia ditandai oleh beberapa gejala, yang antara lain³ :

- Tidak adanya persamaan pandangan (persepsi) antara anggota masyarakat mengenai tujuan yang semula dijadikan patokan oleh masing-masing anggota masyarakat.
- Perilaku para warga masyarakat cenderung melawan/melanggar nilai-nilai dan norma-norma yang telah di sepakati bersama.
- Kerap kali terjadi pertentangan antara norma-norma yang ada di dalam masyarakat
- Nilai-nilai dan norma-norma yang ada di masyarakat tidak lagi di fungsikan dengan baik dan maksimal sebagaimana mestinya
- Tidak adanya konsistensi dan komitmen bersama terhadap pelaksanaan sanksi bagi mereka yang melanggar norma-norma yang ada di masyarakat.
- Kerap kali terjadinya proses-proses sosial di masyarakat yang bersifat disosiatif, seperti persaingan tidak sehat, saling fitnah, saling hasut, pertentangan antar individu maupun kelompok, perang urat saraf, dan seterusnya.

Permasalahan Papua adalah bagian dari diorganisasi perlakuan negara atas masyarakat Papua, diorganisasi sebagai fase kehidupan yang mendahului disintegrasi sosial di perkirakan sebagai dampak dari perbedaan pandangan tentang tujuan kelompok, nilai dan norma sosial, dan tindakan dalam masyarakat. Apabila sistem hukum atau sanksi terhadap perbedaan pemahaman sistem norma dan nilai, sistem tindakan/perilaku anggota kelompok tidak ketat, maka dengan sendirinya langkah pertama menuju

³ Wiki pedia Ensiklope di Bebas, di akses pad atangga 15-09-2019 pukul 08.00 Wit

disintegrasi telah dicapai. Dengan demikian, gejala di organisasi dan disintegrasi bangsa di pengaruhi oleh faktor-faktor antara lain (O'Brien, Schragdan Martin (1964 : 2)⁴:

- Ketidaksesuaian anggota kelompok mengenai tujuan kehidupan sosial kemasyarakatan yang telah disepakati;
- Norma dan nilai sosial yang ada sudah tidak mampu lagi membantu anggota masyarakat dalam mencapai tujuan individu dan kelompok;
- Norma dan nilai kelompok yang telah disepakati anggota kelompok bertentangan satu sama lainnya;
- Sanksi sudah menjadi lemah bahkan tidak dilaksanakan dengan konsekuen
- Tindakan anggota masyarakat telah bertentangan dengan norma dan nilai kelompok.

Dalam konteks Indonesia sekarang, ancaman akan disintegrasi bangsa melalui tanda-tanda acaman sebagai berikut :

- Berbagai konflik yang muncul di daerah seperti Aceh, Poso, Maluku dan Papua yang pada awalnya akibat ketidakadilan secara ekonomi, namun akhirnya di bungkus dengan pertikaian beraroma SARA.
- Sejak dilakukan sistem pemilihan kepada daerah secara langsung, untuk mencapai kemenangan para calon kepala daerah dan pendukungnya telah mempertontonkan pendidikan primordial kepada masyarakat. Hal ini merupakan bibit-bibit secara tidak langsung telah menanamkan permusuhan yang suatu saat bisa memicu konflik yang bernuansa SARA.
- Pemekaran wilayah. Sejak diberlakukannya pemekaran wilayah banyak terbentuk kabupaten, kota maupun provinsi baru. Tuntutan pemekaran semakin hari semakin banyak dan kadangkala menimbulkan konflik antar-wilayah yang akan di mekarkan dengan pihak pemerintah daerah yang jika tidak ditangani secara hati-hati juga dapat memiliki potensi perpecahan bangsa ini.⁵

Sejak reformasi 1999, Indonesia telah membuka fase baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu aspek yang dilihat dalam sisi perubahan ini adalah kebebasan berpendapat dan pengakuan negara atas hak-hak bagi masyarakat di daerah melalui penerapan desentralisasi kewenangan. Kedua hal tersebut merupakan tuntutan bagi masyarakat lokal, kerana hampir 36 tahun kepentingan daerah di pasung oleh pemerintah pusat. Selain membawa aspek positif dalam membangun tatanan kenegaraan, reformasi tersebut berdampak tidak baik bagi keberlangsungan negara bangsa. Kebebasan berpendapat bagi rakyat disalah gunakan hingga mengarah pada perpecahan, atau kebebasan yang kebablasan tanpa di ikat dengan nilai. Disisi lain desentralisasi melalui otonomi daerah telah membuat masyarakat lokal terfragmentasi pada unsur kelompok seperti etnis, suku, agama dan ras.

Seperti apa yang dikemukakan oleh Syadirman Suryoadiprojo⁶, ada dua hal yang menyelimuti negara bangsa ini kedalam proses disintegrasi bangsa yaitu, ketidakpuasan masyarakat di daerah terhadap pemerintah pusat dan konflik antar etnik yang menyebar di seluruh Indonesia sejak reformasi 1998-1999. Rasa ketidakpuasan masyarakat di daerah dengan pemerintah pusat ditandai dengan adanya gerakan seperti GAM di Aceh, OPM di Papua serta daerah-daerah lainnya. Konflik antar etnis dan agama pun meluas dimana-mana, mulai dari Poso, Ambon serta antara suku Dayak dengan Madura. Menarik dari pernyataan tersebut adalah hingga saat ini persoalan etnis belum terselesaikan, fakta membuktikan bahwa persoalan rasisme yang terjadi di Indonesia atas Papua adalah bagian dari pertentangan antar etnis dan ancaman akan adanya disintegrasi bangsa. Berangkat dari hal tersebut, persoalan ini harus sesegera mungkin di selesaikan oleh negara. Adapun upaya yang dilakukan untuk memperkokoh integrase nasional Indonesia adalah:⁷

- Membangun dan menghidupkan terus komitmen, kesadaran dan kehendak untuk bersatu.
- Menciptakan kondisi yang mendukung komitmen, kesadaran dan kehendak untuk bersatu dan membiasakan diri untuk selalu membangun konsensus.

⁴Lihat Panji Suminar, Integrasi Dan Disintegrasi Dalam Perspektif Kearifan Lokal, Badan Pengembangan Kebudayaan Dan Pariwisata Deputi Bidang Pelestarian Dan Pengembangan Budaya Direktorat Tradisi Dan Kepercayaan Proyek Pelestarian Dan Pengembangan Tradisi Dan Kepercayaan Jakarta 2003, Hal 3

⁵Sofyan Tan, Pendidikan Multikulturalisme: Solusi Ancaman Disintegrasi Bangsa, Jurnal Antropologi Sosial Budaya ETNOVISI•Vol. II•No. 1•April 2006 hal 36

⁶Jurnal ketahanan Nasional, IV (2) 2001

⁷Wiki pedia Ensiklope di Bebas, di akses pada tanggal 5-09-2019 pukul 08.00 Wit

- Membangun kelembagaan (Pranata) yang berakar pada nilai dan norma yang menyuburkan persatuan dan kesatuan bangsa.
- Merumuskan kebijakan dan regulasi yang konkret, tegas dan tepat dalam aspek kehidupan dan pembangunan bangsa, yang mencerminkan keadilan bagi semua pihak, semua wilayah.
- Upaya bersama dan pembinaan integrasi nasional memerlukan kepemimpinan yang arif dan efektif.

METODOLOGI

Tulisan ini menggunakan metode fenomenologis⁸, dimana peneliti berusaha untuk memahami arti peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang biasa dalam situasi tertentu. Instrument serta teknik pengumpulan data yang digunakan berbentuk observasi, wawancara dan dokumentasi melalui tahapan penelitian yang mencakup pengumpulan data, reduksi dan penyajian data, analisis serta kesimpulan dan verifikasi.

PEMBAHASAN

A. Perspektif Disintegrasi Bagi Mahasiswa Papua Di Gorontalo

Provinsi Gorontalo adalah salah satu daerah atau yang digemari oleh mahasiswa asal Papua untuk melanjutkan studi lanjut ke perguruan tinggi, baik melalui jalur khusus, beasiswa maupun jalur mandiri. Sebagai daerah yang kurang lebih 20 tahun dimekarkan dari provinsi Sulawesi Utara sangat menjanjikan buat putra-putri di daerah lain untuk melanjutkan studi di daerah ini. Dengan keramahan dan sikap terbuka dan toleransinya masyarakat Gorontalo terhadap masyarakat yang berasal dari daerah lain, membuat daerah ini menjadi pilihan alternatif untuk melanjutkan studi bagi putra-putri di daerah lain. Di provinsi Gorontalo sendiri terdapat beberapa Universitas yang sangat diminati oleh mahasiswa asal Papua, diantaranya adalah Universitas Negeri Gorontalo (UNG), Universitas Gorontalo (UG) dan Universitas Ichsan Gorontalo (Unisan). Secara populasi mahasiswa asal Papua berdomisili di Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo. Pada sisi afiliasi sosial, kerukunan hidup antar mahasiswa asal Papua dengan masyarakat Gorontalo terjalin dengan baik. Hal ini ditandai dengan adanya tidak pernah terjadi konflik atau masalah yang menyangkut hubungan antara mahasiswa asal Papua dan masyarakat Gorontalo maupun mahasiswa asal daerah lain.

Sebagaimana kita ketahui, belakangan ini terjadi permasalahan menyangkut dengan ancaman disintegrasi bangsa yang mengarah kepada pemisahan yang dituntut oleh masyarakat Papua di seluruh penjuru dunia. Pemicu dari gerakan tersebut dilatarbelakangi oleh persoalan rasisme yang diduga dilakukan oleh sekelompok ormas asal Jawa Timur terhadap mahasiswa asal Papua di Jawa Timur. Untuk melihat realitas tersebut, mahasiswa Papua dan seluruh elemen masyarakat Gorontalo mengutuk keras atas tindakan rasisme yang dilakukan terhadap masyarakat Papua. Akibat dari masalah tersebut konflik terbuka terjadi di seluruh wilayah Papua menuntut referendum yang mengarah pada disintegrasi bangsa. Untuk menyikapi masalah tersebut, bagi mahasiswa Papua di Gorontalo tidak sependapat dengan tuntutan masyarakat Papua pada umumnya, data menunjukkan bahwa mahasiswa Papua di Gorontalo tidak pernah merasa terganggu selama mereka kuliah di Gorontalo, mereka diperlakukan secara baik oleh masyarakat Gorontalo dan kampus dimana tempat mereka menimba ilmu pengetahuan. Selain itu, hubungan mereka dengan mahasiswa antar daerah terjalin dengan baik. Selama mereka di Gorontalo, tidak ada sedikitpun diskriminasi yang mereka terima. Dalam menjalankan aktifitas keseharian, mahasiswa Papua sangat merasa nyaman dan tidak terganggu pada aspek keamanan, mereka bisa beraktifitas hingga larut malam untuk menjalankan aktifitas dengan baik. Pada aspek kebutuhan, mahasiswa asal Papua merasa biaya hidup di Gorontalo sangat murah dan bisa dijangkau dan sangat berbeda dengan daerah lain dan pada khususnya di Papua. Sedangkan pada aspek budaya, walaupun penduduk Gorontalo mayoritas Islam namun, toleransi antar umat beragama terjalin dengan baik.

Atas perlakuan tersebut, bagi mahasiswa Papua di Gorontalo referendum yang mengarah pada proses disintegrasi bangsa bukan sebagai solusi untuk menyelesaikan masalah Papua. Konkritnya, apa yang didapat oleh mahasiswa atau masyarakat Papua di daerah lain tidak seperti apa yang mereka rasakan di Gorontalo. Sesuai dengan data lapangan hampir secara keseluruhan mahasiswa Papua di Gorontalo tidak sepekat dengan referendum sebagai wacana disintegrasi bangsa. Jika dirumuskan aspek yang menjadi tolak ukur

⁸ Lihat Moleong, Lexy J. (2010), Metodologi penelitian kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung Hal. 17. Penggunaan metode fenomenologis dimaksudkan untuk dapat mendeskripsikan gejala atau fenomena yang nampak sebagaimana adanya dari obyek penelitian

pikiran mahasiswa Papua tidak sependapat dengan referendum yang mengarah pada proses disintegrasi bangsa adalah :

1. Pendidikan.

Pendidikan merupakan salah satu aspek yang mendasar bagi masyarakat Papua, selama puluhan tahun kesetaraan pendidikan bagi masyarakat Papua dengan daerah lain sangat memprihatinkan, hal ini kemudian berdampak pada aspek indeks pembangunan manusia masyarakat Papua yang tiap tahunnya berada pada posisi atau zona merah. Padahal disisi lain, hasil alam melimpahruah, namun masyarakatnya sangat jarang memiliki akses terhadap pendidikan. Upaya untuk membangun manusia Papua diseriusi sejak pasca reformasi 1998-1999, dimana Papua diberikan otonomi khusus sebagai bagian dari penyelesaian masalah Papua. Dengan dana otonomi khusus, masyarakat Papua harus mendapat atau menerima upah dari negara berkisar 17 juta pertahun, namun dana otonomi khusus belum bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat di Papua melalui jalur pendidikan. Untuk mengoptimalkan masalah tersebut, upaya yang dilakukan oleh negara terhadap Papua adalah memberikan jalur khusus kepada generasi Papua untuk melanjutkan studi, baik masuk perguruan tinggi tanpa tes maupun pemberian beasiswa kepada generasi Papua dalam melanjutkan pendidikan tinggi. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk menselaraskan pendidikan antara masyarakat Papua dengan daerah lainnya.

Sesuai dengan data yang didapatkan, mahasiswa Papua yang berdomisili di Gorontalo merasa bersukur atas kehadiran negara dalam memberikan akses melalui kemudahan dan biaya pendidikan yang mereka dapatkan. Dengan perlakuan khusus tersebut, membuat mereka berkesempatan untuk memperoleh pendidikan seperti layaknya mahasiswa yang berasal dari daerah lain. Selain akses yang mereka peroleh melalui negara, keberadaan daerah dimana mereka berdomisili juga menjadi penentu dalam mendorong kesadaran dan keberhasilan mereka dalam dunia pendidikan. Data lapangan juga menunjukkan bahwa, keberadaan masyarakat Gorontalo yang sangat terbuka sangat membantu mereka dalam melanjutkan pendidikan tinggi. Gorontalo dianggap sebagai daerah yang representative untuk mahasiswa Papua dalam dunia pendidikan, baik masyarakat maupun pihak Universitas, mereka diterima secara baik, bahkan kehidupan mereka dalam kampus diberikan keleluasaan dan hubungan yang baik antara mereka dengan civitas akademik. Pada segi keakraban, hubungan yang terbangun bukan hanya antara mahasiswa dengan mahasiswa, bahkan keakraban pun terlihat dengan jelas antara mahasiswa asal Papua dengan tenaga pengajar (dosen). Hal ini dibuktikan dengan perlakuan yang sama tanpa memandang suku, ras dan agama serta tidak adanya diskriminasi antara suku tertentu dalam membangun afiliasi antara sesama. Ulasan ini yang mendasari mahasiswa Papua di Gorontalo tidak sepemahaman dengan gerakan referendum yang mengarah pada disintegrasi bangsa.

2. Pemerataan pembangunan

Selama orde baru, pembangunan nasional bersifat Jakarta sentries, kurangnya perhatian pusat kepada daerah pada aspek pembangunan menjadi permasalahan panjang bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Masyarakat di daerah dikebiri haknya oleh pemerintah pusat, kue pembangunan yang seharusnya dibagi secara merata disemua pelosok negeri telah disulap dan diambil sendiri oleh Jakarta. Hal ini yang kemudian mendorong masyarakat di daerah untuk menuntut keseimbangan pembangunan antara Jakarta dengan luar Jakarta. Masyarakat daerah yang sangat merasakan ketimpangan ini adalah Papua, kekayaan alam yang mereka miliki tidak sebanding dengan apa yang mereka rasakan sehari-hari. Ketimpangan ini pula yang menjadi ancaman disintegrasi bagi Papua terhadap Indonesia. Mulai dari gerakan separatis (GAM) hingga gerakan massa adalah bagian dari ketimpangan dan tidak meratanya pembangunan yang mereka terima. Namun, pemerintahan Jokowi layaknya mendapatkan nilai plus dalam masalah ini, dengan pemerintahan yang ada telah mampu menciptakan keseimbangan dan konsentrasi kebijakan terhadap daerah di luar Jawa khususnya Papua. Konsentrasi kebijakan pemerataan pembangunan tersebut telah dirasakan oleh masyarakat Papua dengan adanya jangkauan masyarakat terhadap pasar yang setara dengan jangkauan masyarakat di pulau Jawa dan daerah lainnya. Misalnya, pada aspek bahan pokok seperti premium, sebelum harga premium di Jawa sekitar Rp.6000-7.000-an sementara di Papua berkisar Rp. 50.000, hal ini pun searah dengan kebutuhan pokok lainnya.

Permasalahan tersebut membuat sekat yang sangat jauh antara Papua dengan daerah lainnya, sebaliknya permasalahan ini yang selalu memicu pergolakan di Papua hingga mengarah pada disintegrasi bangsa. Namun demikian, data lapangan menunjukkan bahwa mahasiswa Papua di Gorontalo merasa bahwa akses pembangunan di Papua sangat diperhatikan oleh negara dan bahkan diprioritaskan oleh negara. Dengan

keseimbangan pembangunan yang ada membuat mahasiswa merasa selama puluhan tahun hidup bernegara, tapi kali ini mereka merasa bahwa kehadiran negara telah mampu menyelesaikan ketimpangan pembangunan di Papua. Mulai dari tol laut, transportasi jalan, infrastruktur yang tersedia sangat membantu masyarakat Papua dalam meningkatkan taraf hidup mereka. Olehnya itu, ketimpangan pembangunan yang selama ini menjadi pemicu disintegrasi bangsa telah dapat direalisasi oleh negara. Sehingga disintegrasi bukan merupakan solusi dalam menyelesaikan masalah Papua, dengan adanya perhatian penuh dari negara, sebagai mahasiswa Papua layaknya memberikan apresiasi atas apa yang telah dilakukan oleh negara.

3. Nasionalisme

Nasionalisme bagi suatu bangsa adalah hal yang mutlak dan tidak ada tawar menawar dalam perspektif ini. Bersatunya manusia dalam negara bangsa karena dilandasi oleh rasa cinta mereka terhadap tanah air maupun antar sesama. Negara bangsa yang mengalami krisis nasionalisme akan membuat negara tersebut kehilangan jati dirinya sebagai suatu bangsa. Kaitannya dengan Indonesia kekinian, nasionalisme selalu digerogoti oleh perbedaan ras, suku, agama dan bahasa. Sejatinya, hal tersebut merupakan kekayaan tersendiri bagi Indonesia, namun perbedaan atau kebhinekaan selalu dipertentangkan dengan nasionalisme yang mengakibat gesekan antara negara dengan kepentingan suku, ras, agama maupun golongan. Jika negara bangsa ini menyadari aspek secara kultur maupun historis maka, kita akan sependapat bahwa aspek “kekitaan” akan menjadi Indonesia utuh, sedangkan “keakuan” akan membawa bangsa ini menuju disintegrasi. Perdebatan antara “keakuan dan kekitaan” bagi Indonesia belum berakhir dan ini menjadi pekerjaan besar bagi negara untuk menyelesaikannya. Kasus rasisme bagi Papua adalah bagian dari persoalan “keakuan” yang selalu menonjol akhirnya menjustifikasi suku dan etnis tertentu sehingga mengarah pada perpecahan sebagai anak bangsa. Persolan ini kemudian berbuntut pada proses pengakuan secara sepihak antara “aku nasionalisme, sedangkan “kau tidak nasionalisme”. Diantara perdebatan-perdebatan tersebut sangat berdampak pada proses penyelenggaraan negara bangsa yang hingga hari ini masih berkatut pada tuntutan referendum rakyat Papua.

Untuk menyikapi masalah tersebut, data lapangan menunjukkan mahasiswa Papua yang berdomisili di Provinsi Gorontalo mempunyai rasa nasionalisme yang tidak kalah penting dengan daerah-daerah lain. Mereka merasa memiliki terhadap Indonesia, hal ini dibuktikan lewat perspektif mahasiswa bahwa mereka adalah Papua, mereka adalah Indonesia dan mereka juga Gorontalo. Jika diluar sana Ormas tertentu yang mengkalim mereka tidak nasionalis, namun di Gorontalo menunjukkan lain, dimana mahasiswa asal Papua di Gorontalo adalah bagian dari komponen bangsa yang sangat nasionalis dalam menjaga keutuhan bangsa. Faktanya mereka tidak sepakat dengan referendum yang mengarah pada disintegrasi bangsa, mahasiswa Papua di Gorontalo sangat cinta akan Indonesia, cinta akan Papua dan cinta akan Gorontalo. Artinya, permasalahan Papua bukan pada aspek nasionalisme, namun lebih mengarah pada ketidakadilan yang mereka terima sebagai anak bangsa, baik dilakukan oleh negara maupun anak bangsa lainnya. Sesuai dengan gambaran di atas, “keakuan” bagi masyarakat Papua adalah bagian dari pengakuan atas identitas mereka yang membedakan dengan daerah lain, namun pada aspek “kekitaan” mereka merasakan mereka adalah bagian dari Indonesia dan mereka adalah bagian dari anak bangsa seperti daerah-daerah lainnya. Atas hal tersebut, nasionalisme bagi Papua adalah hal yang sudah final dan tidak perlu diperdebatkan, namun hal yang sangat krusial adalah pengakuan sebagai anak bangsa yang memandang mereka adalah bagian keutuhan dari kita sesama anak bangsa.

PENUTUP

Disintegrasi adalah ancaman terbesar bagi negara kesatuan, sebagai negara yang syarat akan nilai historis atau sejarah mengenai persatuan dan kesatuan, jelas predikat ini menjadi suatu ciri khas dari negara Indonesia yang dikenal heterogen. Papua sebagai bagian dari Indonesia tentu menjadi harga yang sangat mahal bagi negara yang berlambang garuda di mata internasional. Kekayaan alam dan keanekaragaman hayati yang terkandung didalamnya menjadi modal utama untuk keberlangsungan hidup negara republik Indonesia. Sangat disayangkan isu rasisme yang terjadi di Surabaya berdampak terhadap keutuhan NKRI. Mahasiswa Papua itu menilai bahwa keberagaman merupakan sesuatu yang telah menjadi keniscayaan dinegeri ini sehingga belum ada alasan kuat untuk menyuarakan referendum bagi Papua. Di sisi lain ada tiga faktor yang menjadikan mahasiswa Papua yang berada di Gorontalo untuk tidak mendukung referendum di Papua, yang pertama karena adanya bantuan pendidikan terhadap anak-anak Papua untuk membangun kualitas sumber daya manusia yang ada di provinsi Papua, yang ke dua ialah adanya pembangunan

infrastruktur dan perbaikan sarana dan prasarana transportasi di Provinsi Papua sebagai pembangunan kualitas ekonomi dan pemerataan pembangunan di Indonesia. Serta yang ketiga adalah semangat nasionalisme yang masih bergelora di setiap diri mahasiswa Papua yang kuliah di Gorontalo sebagai bentuk penolakan terhadap isu referendum yang ada di negeri ini.

SUMBER BACAAN :

Sofyan Tan, Pendidikan Multikulturalisme: Solusi Ancaman Disintegrasi Bangsa, Jurnal Antropologi Sosial Budaya ETNOVISI•Vol. II•No. 1•April 2006.

Moleong, Lexy J. (2010), Metodologi penelitian kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung.

Panji Suminar, Integrasi Dan Disintegrasi Dalam Perspektif Kearifan Lokal, Badan Pengembangan Kebudayaan Dan Pariwisata Deputi Bidang Pelestarian Dan Pengembangan Budaya Direktorat Tradisi Dan Kepercayaan Proyek Pelestarian Dan Pengembangan Tradisi Dan Kepercayaan Jakarta 2003.